



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## ANTISIPASI PERSOALAN LONJAKAN PEMUDIK LEBARAN 2023

**Suhartono**

Penyusun Administrasi Pegawai Legislatif  
[suhartono2@dpr.go.id](mailto:suhartono2@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran pemerintah yang terkait dengan manajemen penyelenggaraan mudik Lebaran Tahun 2023 ini untuk dapat mengantisipasi kenaikan jumlah pemudik dari 86 juta menjadi 123,8 juta atau meningkat 46% dibanding Tahun 2022. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 27,32 juta pemudik menggunakan kendaraan pribadi; 25,13 juta dengan sepeda motor; 22,77 juta dengan kereta api, serta 9,53 juta dengan mobil sewa. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 19 - 21 April 2023, sedangkan puncak arus balik akan terjadi dua kali, yakni pada 24 - 25 April 2023 dan 29 April - 1 Mei 2023.

Ada tiga persoalan penting yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), dan pengelola moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, sebagai berikut:

- Persoalan keamanan dan keselamatan;
- Persoalan kemacetan; dan
- Tarif transportasi publik.

Antisipasi persoalan keamanan dan keselamatan ada pada keamanan jalur-jalur yang akan digunakan pemudik serta kehandalan moda transportasi dalam memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan bagi penumpangnya. Dalam hal ini diperlukan kegiatan inspeksi keselamatan (*rampt check*) pada semua moda transportasi publik baik bus, kereta api, pesawat udara, dan kapal laut untuk menekan jumlah kecelakaan atau kerusakan sarana transportasi saat melayani pemudik. Antisipasi gangguan keamanan atau potensi kriminalitas agar perjalanan mudik tahun ini berkesan aman.

Persoalan kemacetan menjadi fokus presiden, terutama berdasarkan evaluasi penyelenggaraan mudik 2022 terkait kemacetan panjang di tol Merak menjelang ke pelabuhan. Manajemen kapal laut dan parkir kendaraan menunggu keberangkatan di lintas Merak-Bakauheni memberikan dampak pada kemacetan. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, PT ASDP mengoptimalkan 7 dermaga (1 dermaga eksekutif dan 6 dermaga reguler) dan peningkatan kapasitas parkir menjadi 5.000 unit kendaraan per hari. Selain itu, PT ASDP akan memanfaatkan Pelabuhan Ciwandan untuk mengangkut para pemudik dengan sepeda motor dan truk logistik. Persiapan yang maksimal perlu dilakukan oleh PT ASDP untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan parah di penyeberangan feri seperti tahun lalu.

Walaupun kemacetan Tahun 2022 tidak menonjol pada ruas trans Jawa sejak dibukanya sejumlah ruas tol baru, namun perlu diantisipasi lonjakan penggunaan kendaraan pribadi pada Tahun 2023. Pada Tahun 2023, daya dukung ruas tol ini akan bertambah dengan dibukanya secara fungsional ruas Cisumdawu (Cileunyi, Sumedang, Dawuan) yang akan menghubungkan Jawa Barat bagian Selatan dengan Utara. Penggunaan fungsional akan menambah alternatif bagi pemerintah mengurai potensi kemacetan akibat pergerakan pemudik jalur selatan. Pengelola jalan tol juga mengantisipasi lonjakan pemudik dengan menambah 9.000 fasilitas toilet *portable* untuk mengurai antrian dan kemacetan di sekitar *rest area*. Perlu diantisipasi juga oleh Pemda, baik sebagai tujuan maupun perlintasan pemudik, untuk meningkatkan

kualitas sarana dan prasarana jalan. Potensi kemacetan akibat penggunaan kendaraan pribadi baik mobil dan motor perlu diantisipasi dengan menawarkan atau mendorong pemudik menggunakan transportasi publik. Penawaran mudik gratis dari pemerintah dan swasta menjadi alternatif menarik pemudik menggunakan transportasi publik seperti Kementerian Perhubungan menawarkan keberangkatan 11-20 April dan balik 25 April-4 Mei. PT KAI per 4 April tersisa 3.705 motor dari kuota 6.735 motor. Kapal laut tersisa 1.579 kuota dari 5.000 motor per 5 April. PT Pelindo sendiri menawarkan kuota 3.605 penumpang dengan bus ke berbagai tujuan.

Transportasi publik akan lebih memiliki daya tarik bagi pemudik, ketika lonjakan tarif bisa ditekan dengan pengawasan tarif yang efektif. Momentum lebaran yang akan meningkatkan permintaan sering menjadi celah bagi operator untuk menaikkan pendapatan dengan melanggar batas tarif. Ketidakpatuhan operator akan mendorong pemudik untuk menggunakan kendaraan pribadi sehingga berdampak pada persoalan kemacetan, keamanan, dan keselamatan.

## Atensi DPR

Langkah-langkah antisipasi menghadapi lonjakan pemudik selama masa mudik Lebaran 2023 menjadi perhatian DPR RI. Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja pada tanggal 4 April 2023 dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menekankan urgensi persiapan penyelenggaraan infrastruktur dan transportasi dalam menghadapi lonjakan arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. Terkait antisipasi lonjakan pemudik, Komisi V DPR RI dapat memastikan: 1) pelaksanaan uji keamanan dan keselamatan sarana transportasi; 2) kondisi jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses menuju tujuan mudik, ke dan dari bandara, pelabuhan, serta terminal bus; 3) pelaksanaan pengawasan tarif transportasi publik yang efektif; 4) pelaksanaan mudik gratis; dan 5) mengurai kemacetan di penyeberangan feri.

## Sumber

cnnindonesia.com, 10 April 2023;  
detik.com, 11 April 2023;  
*Kompas*, 10, 11, 12 April 2023; dan  
*Rakyat Merdeka*, 11 April 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023